

PERAN KOMITE SEKOLAH SMP DI KOTA SEMARANG¹

Oleh: Suwarno Widodo², Senowarsito³, Dias Andris Susanto⁴, Ryky Mandar Sari⁵

Abstrak

Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non – profit dan non – politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. MBS adalah suatu bentuk alternatif program desentralisasi pendidikan di sekolah. Ciri – ciri MBS adalah adanya otonomi yang kuat di tingkat sekolah, peran aktif masyarakat dalam pendidikan, proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan, menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan pendidikan. Penelitian ini dilakukan di SMP di Kota Semarang selama bulan September dan Oktober 2008 dengan fokus penelitian peran Komite Sekolah SMP di Kota Semarang. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, (2) peran komite sekolah sebagai pendukung, (3) peran komite sekolah sebagai pengontrol, dan (4) peran komite sekolah sebagai mediator. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif - kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Tehnik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa: (1) peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan telah menjalankan perannya dalam hal: a) menyusun RAPBS bersama sekolah, b) mengesah RAPBS pada bulan Juli (seharusnya), c) mengontrol pelaksanaan APBS, d) mengontrol sistem pelaporan pelaksanaan APBS setiap bulan, e) melaksanakan perubahan APBS pada setiap bulan Januari, f) mempertanggungjawabkan kepada masyarakat setiap akhir semester, g) memberikan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan-kebijakan sekolah yang berkaitan dengan fungsi, hak dan kewajiban Komite Sekolah. (2) peran komite sekolah sebagai pendukung telah menjalankan perannya dalam hal: a) kegiatan operasional komite, b) pembelian alat tulis kantor, c) pendataan dan pemaparan data, d) peningkatan kualitas manajemen, f) pelayanan ruang Komite Sekolah, g) pelaksanaan pergantian pengurus, h) pembentukan paguyuban orang tua siswa. Kesungguhan terhadap pelaksanaan program kerja diwujudkan dengan penyediaan dana bagi terlaksananya kegiatan tersebut. (3) peran komite sekolah sebagai pengontrol telah berperan sebagaimana mestinya untuk hal: a) menyangkut

¹ Ringkasan Hasil Penelitian, Tahun 2008

² Dosen PS. Pendidikan PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang

³ Dosen PS. Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris FPBS IKIP PGRI Semarang

⁴ Dosen PS. Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris FPBS IKIP PGRI Semarang

⁵ Dosen PS. Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris FPBS IKIP PGRI Semarang

pelaksanaan jadual KBM, b) bidang anggaran, c) tenaga kependidikan baik guru maupun non guru, d) prestasi sekolah selalu mendapatkan perhatian Komite Sekolah, e) Komite juga mengadakan pemantauan terhadap hasil ujian, kelulusan maupun kenaikan kelas. dan (4) peran komite sekolah sebagai mediator telah menjalankan perannya, dalam hal: a) membina hubungan yang sinergis antara sekolah dan stakeholders, b) mengadakan sarasehan pendidikan, c) menyelenggarakan diskusi pendidikan, d) menerbitkan media komunikasi dan, e) pemutahiran data. Namun kurang maksimal di dalam memediasi antara pihak sekolah dengan pemerintah maupun dengan dunia usaha/ industri. Saran yang disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian antara lain, (1) Peran komite sekolah perlu lebih ditingkatkan, terutama dalam peran sebagai mediator antara sekolah dengan pemerintah atau sekolah dengan dunia usaha/industri. (2) Perlu penelitian lanjut mengingat fokus penelitian hanya menyangkut masalah peran komite sekolah.

Kata kunci : Peran, Komite Sekolah

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Konsekwensi logis dari peraturan tersebut adalah bahwa manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan harus ditingkatkan. Peningkatan peran serta masyarakat berimplikasi lebih terjaminnya keberadaan dan kelangsungan lembaga sekolah, sehingga masyarakat lebih dapat menilai dan mengontrol terhadap program yang dilakukan sekolah. Masyarakat akan lebih peduli dan akan lebih mendukung program sekolah agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, termasuk mendukung sumber dana dan pembangunan fisik sekolah. Dengan demikian peran serta masyarakat harus dimaksimalkan, sehingga dapat meminimalkan kendala atau hambatan yang dihadapi oleh sekolah.

Manajemen sekolah yang cenderung mengabaikan peran orang tua atau masyarakat sekitar akan menyebabkan sikap pasif orang tua atau masyarakat terhadap sekolah dan segala kepentingannya. Akibatnya, desentralisasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Indonesia terhambat. Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, selain memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap sekolah untuk pengelolaannya, perlu diusahakan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan.

Memasuki era penerapan MBS peran serta masyarakat ditingkatkan dan diperluas. Sekolah telah berhasil membentuk pengurus Komite Sekolah. Keberadaan Komite Sekolah dalam melaksanakan perannya sangat mendukung kelancaran aktifitas sekolah.

Usaha pengembangan sekolah oleh kepala sekolah bersama guru ternyata tidak terlepas dari dukungan dan peran serta masyarakat dalam hal ini Komite Sekolah. Komite Sekolah merupakan inti penggerak dari pengejawantahan peran serta masyarakat dalam merancang program, mempertimbangkan, mendukung pelaksanaan, mengawasi jalannya berbagai kegiatan pendidikan serta mediator bagi sekolah dengan masyarakat atau pemerintah.

B. Fokus Masalah

Fokus pada penelitian adalah mengenai peran Komite Sekolah dalam memberikan kontribusi terhadap sekolah, maka muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan kebijakan sekolah, pendukung pelaksanaan program sekolah, pengontrol kegiatan sekolah, dan mediator antara masyarakat dan sekolah SMP di Kota Semarang.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk menemukan peran komite sekolah SMP di Kota Semarang. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat ditentukan sebagai berikut: Mendiskripsikan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan terhadap program sekolah, pendukung pelaksanaan program sekolah, pengontrol pelaksanaan program sekolah, dan mediator antara masyarakat dengan sekolah.

D. Kajian Pustaka

1. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah pada dasarnya dijiwai oleh pola baru manajemen pendidikan masa depan. Sekolah yang akan memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengelola lembaganya. Secara umum manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada kepala sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2001 : 3). Dengan pemberian otonomi lebih besar, sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya (mengelola sumber daya, sumber dana dan sumber belajar), sehingga sekolah lebih mandiri. Sekolah yang mandiri akan lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Begitu juga dalam pengambilan keputusan yang partisipatif, maka rasa memiliki warga sekolah dapat meningkat. Peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa tanggung jawab yang pada akhirnya akan meningkatkan dedikasi warga sekolah terhadap sekolahnya. Baik peningkatan otonomi sekolah maupun pengambilan keputusan partisipatif kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional yang berlaku.

Rohiat (2008: 47) Manajemen Berbasis Sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab yang lebih

besar kepada sekolah), memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha), dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau *stakeholder* yang ada. **Ogawa dan White** (1994: 53) mengomentari, *School Base Management (SBM) is one of form of restructuring that has gained widespread attention. Like others, it seek to change the way school system conduct business. It is aimed squarely at improving the academic performance of school by changing their organizational design. Drawing on the experiences of existing programs.*

2. Komite Sekolah

Pembentukan Komite Sekolah, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Mendiknas No.044/U/2002, juga merupakan amanat dari UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, di mana dinyatakan bahwa sasaran yang akan dicapai dalam program pembinaan pendidikan dasar dan menengah di antaranya adalah terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*school/community based management*) dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Sekolah (Pendidikan) di setiap kabupaten/kota, serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di setiap sekolah.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah diberlakukan sejak 2 April 2002 dalam mendukung terwujudnya sistem pendidikan yang berbasis kepada masyarakat (*community-based education*) dan manajemen pendidikan berbasis sekolah (*school-based management*). Departemen Agama pun telah menerbitkan surat keputusan sejenis sebelumnya, yaitu Keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor E/101/2001 tanggal 24 April 2001 tentang Majelis Madrasah.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini banyak satuan pendidikan, terutama swasta, belum membentuk Komite Sekolah. Mereka yang sudah membentuknya banyak yang hanya sekedar formalitas atau untuk memenuhi persyaratan menerima bantuan atau proyek tertentu. Banyak pula yang sekedar membentuk tanpa mengetahui esensi lembaga ini, sehingga hanya mengganti BP3 yang telah ada dengan nama Komite Sekolah.

3. Peran Komite Sekolah

Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pada jenjang pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah (Depdiknas, 2004).

Komite Sekolah berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan latar alami (*Natural Setting*) sebagai sumber data langsung mengenai peran komite sekolah SMP di kota Semarang . Penelitian ini dimaksudkan memperoleh gambaran / deskripsi tentang peran komite sekolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Disain penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan studi deskripsi dengan melakukan observasi, wawancara dan studi terhadap peran komite sekolah SMP di kota Semarang. Peneliti menjajali tempat dan orang-orang yang dapat dijadikan sumber data atau subjek penelitian, mencari lokasi yang dipandang sesuai dengan maksud pengkajian dan selanjutnya mengembangkan jaringan yang lebih luas untuk menemukan sumber data.

Penelitian ini menggunakan disain studi kasus observasi, yang memusatkan perhatian pada suatu tempat atau objek tertentu dengan teknik observasi peran serta yaitu peran serta komite sekolah SMP di Kota Semarang.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari catatan yang dibuat peneliti pada waktu mengadakan pengamatan dan wawancara di lapangan. Di samping itu, data lainnya berupa dokumen, laporan, gambar dan foto. Data yang dikumpulkan ialah data yang berhubungan dengan rincian fokus penelitian yaitu peran komite sekolah SMP di Kota Semarang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus komite sekolah SMP di Kota Semarang. Komite sekolah adalah suatu bagian dari masyarakat yang duduk sebagai wakil dari masyarakat sekolah. Peneliti memilih informan masyarakat yang duduk dalam kepengurusan komite sekolah yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota untuk pelaksanaan trianggulasi, peneliti memilih informan terdiri dari pengurus komite sekolah, kepala sekolah dan atau guru, serta masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah peneliti memperoleh ijin penelitian, peneliti segera mempersiapkan kerangka kerja yang akan digunakan untuk menggali data yaitu panduan lapangan. Setelah itu, kegiatan dimulai dengan cara menggunakan

pendekatan dengan subjek penelitian. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik bila antara peneliti dengan subjek penelitian sudah saling kenal sehingga dapat tercipta suatu yang akrab dan terjadi kerja sama yang baik.

Beberapa alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknis diskriptif yang meliputi tiga prosedur yaitu : 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi.

F. Hasil Temuan Penelitian

Bab ini akan dipaparkan data atau deskripsi hasil penelitian. Data diperoleh dari SMP serta dari pengurus Komite Sekolah SMP di kota Semarang. Berdasarkan fokus penelitian paparan data dan diskripsi hasil penelitian diharapkan dapat mengungkapkan: Mendiskripsikan peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pelaksanaan program sekolah dan mediator antara masyarakat dan sekolah.

Sistematika paparan data dan diskripsi hasil penelitian agar memperoleh pembahasan yang menyeluruh, maka peran Komite Sekolah sebagai berikut:

1. Peran Komite Sekolah Sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory Agency*)

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan telah dapat membantu proses penyusunan RAPBS. Sebelum penyusunan dimulai biasanya Komite Sekolah memperoleh acuan RAPBS yang akan disusun. Komite Sekolah mempelajari secara seksama kemudian memberikan masukan berkaitan dengan pengembangan sekolah. Proses pemberian masukan lazimnya dibahas dalam suatu rapat koordinasi antara Komite Sekolah dengan sekolah. Hubungan yang telah terjalin harmonis antara Komite Sekolah dengan sekolah sangat membantu kelancaran pekerjaan tersebut. Mekanisme yang terjadi dalam rapat dinamis, pembicaraan terhadap suatu permasalahan kadang menimbulkan adu argumentasi, tetapi dengan berorientasi demi kebaikan sekolah segala persoalan dapat cepat diatasi. Proses pemberian pertimbangan Komite Sekolah terhadap RAPBS dicapai sesudah terjadi kesepakatan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan ke dalam APBS yang disahkan oleh kepala sekolah. Tetapi dalam tahun pelajaran 2008 / 2009 kebanyakan sekolah SMP baik komite ekolah maupun kepala sekolah mengaku belum menyusun RAPBS yang akan digunakan sebagai acuan untuk program sekolah. Mereka mendapatkan kendala karena aanya aturan grativikasi.

Komite Sekolah dalam hal pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran sudah dapat menunjukkan perannya. Komite Sekolah baik secara langsung maupun tidak lansung memperoleh masukan, aspirasi dan keluhan terutama dari wali murid. Aspirasi-aspirasi tersebut kemudian dibahas dalam forum pertemuan dengan Komite Sekolah. Hasil pertemuan dirumuskan dalam suatu keputusan yang selanjutnya

disampaikan sekolah sebagai bahan pertimbangan terhadap pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran.

Hubungan Komite Sekolah dengan sekolah di dalam menjalankan peran pengembangan sekolah dapat tercermin dari uraian tugas Komite Sekolah. Pertimbangan yang diberikan Komite Sekolah sesuai uraian tugas menyangkut berbagai hal antara lain: 1) menyusun RAPBS bersama sekolah, 2) mengesah RAPBS pada bulan Juli (seharusnya), 3) mengontrol pelaksanaan APBS, 4) mengontrol sistem pelaporan pelaksanaan APBS setiap bulan, 5) melaksanakan perubahan APBS pada setiap bulan Januari, 6) mempertanggungjawabkan kepada masyarakat setiap akhir semester, 7) memberikan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan-kebijakan sekolah yang berkaitan dengan fungsi, hak dan kewajiban Komite Sekolah.

Pertimbangan mengenai sarana dan prasarana sekolah dalam pengembangan sekolah menjadi perhatian rutin bagi Komite Sekolah. Komite Sekolah setelah mengadakan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dihubungkan dengan kondisi fisik, ditindak lanjuti dengan memberi pertimbangan kepada sekolah tentang sarana dan prasarana sekolah. Masukan dan pertimbangan mengenai prasarana dan sarana sekolah dibahas dalam rapat atau pertemuan sekolah. Sarana dan prasarana yang belum mendapatkan droping dari pemerintah menjadi sasaran utama dalam pembahasan antara Komite Sekolah dengan sekolah.

Anggaran pemerintah yang dikucurkan untuk SMP sebenarnya tergolong tidak cukup, karena sekolah – sekolah tersebut merupakan sekolah – sekolah yang baik secara prestasi yang membawa konsekuensi dana yang cukup banyak. Kebutuhan anggaran untuk mencukupi kegiatan akademis dan non akademis serta fisik mendapat perhatian serius dari Komite Sekolah. Komite Sekolah dalam menjalankan perannya selalu memberi pertimbangan perihal anggaran. Pertimbangan disampaikan ke sekolah melalui mekanisme yang sudah menjadi kesepakatan yakni lewat RAPBS.

Optimalisasi peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan pada SMP perlu terus ditingkatkan. Peran sebagai pertimbangan dapat ditingkatkan melalui sistem komunikasi yang lebih lancar. Hubungan timbal balik antara Komite Sekolah sebagai representasi pengguna pendidikan dan sekolah sebagai pengelola pendidikan harus terus menerus ditumbuh kembangkan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.

2. Peran Komite Sekolah Sebagai Pemberi Dukungan (Supporting Agency)

Kegiatan dukungan yang dilakukan komite terhadap sekolah sangat realistis. Hal ini dibuktikan dengan adanya program kegiatan Komite Sekolah. Program kegiatan Komite Sekolah tahun 2008 antara lain meliputi: 1) kegiatan operasional komite, 2) pembelian alat tulis kantor, 3) pendataan dan pemaparan data, 4) peningkatan kualitas manajemen 5) pelayanan ruang Komite Sekolah, 6) pelaksanaan pergantian pengurus, 7) pembentukan paguyuban orang tua siswa. Kesungguhan terhadap pelaksanaan program kerja diwujudkan dengan penyediaan dana bagi terlaksananya kegiatan tersebut.

Realisasi peran Komite Sekolah terhadap mobilisasi ketenagaan dapat diwujudkan dengan berusaha memberi dukungan bagi guru tidak tetap, guru atau pelatih kegiatan ekstra kurikuler maupun tenaga perpustakaan.

Peran Komite Sekolah dalam memberi dukungan di bidang sarana dan prasarana dilakukan antara lain dengan mengadakan pemantauan secara rutin pada sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah serta mencari informasi bila terdapat kekurangan. Langkah yang ditempuh Komite Sekolah antara lain dengan merangkum aspirasi kebutuhan, memprioritaskan kebutuhan dan mencari solusi atau jalan pemecahan. Apabila dipandang perlu pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh komite maka komite melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan bila komite diharapkan menutupi kekurangan, maka komite akan berupaya mencari subsidi terhadap pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dukungan komite yang diperlukan oleh sekolah kemudian dimobilisasi serta dilakukan evaluasi pengadaannya. Berbagai sarana dan prasarana sekolah yang mendapat dukungan komite berupa: 1) laboratorium, 2) komputer, 3) ruang pendidikan/agama, 4) perpustakaan, 5) perangkat kerawitan dan 6) mushola.

Peran Komite Sekolah sebagai pemberi dukungan terhadap dana anggaran menjadi prioritas utama, terutama apabila sekolah mengadakan kegiatan yang menelan biaya melebihi dari yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Kegiatan dukungan dalam masalah pendanaan biasanya ditempuh secara prosedural dan berhati-hati. Sikap demikian perlu diambil mengingat telah ada dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Namun demikian, demi kepentingan program sekolah, komite selalu berupaya mengakomodir permintaan tambahan anggaran untuk kegiatan yang hanya bersifat unggulan.

Berkaitan dengan peran Komite Sekolah mengenai mobilisasi dana anggaran yang bersumber dari wali murid, komite menunjuk bendahara untuk menampung dana tersebut. Penggunaan dana selalu dibukukan dan dikerjakan administrasinya secara akuntabel dan transparan. Hal tersebut berjalan pada tahun – tahun sebelumnya, sebelum adanya pengguliran sekolah gratis oleh pemerintah daerah dimana pihak sekolah dilarang untuk memungut biaya dari para siswa. Sehingga sekarang peran dari komite sekolah kaitannya dengan dana agak berkurang, karena sudah tidak ada lagi keuangan yang bisa diatur oleh komite yang bersumber dari orang tua/ wali murid. Kemudian biasanya hasil laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dipajang di papan yang strategis. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam hal pelaksanaan dukungan anggaran ditempuh secara berkala. Kegiatan kunjungan dan rapat serta pertemuan-pertemuan merupakan sarana untuk mengevaluasi kegiatan dukungan terhadap anggaran.

3. Peran Komite Sekolah sebagai Badan Pengontrol (*Controlling Agency*)

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh komite pada dasarnya ditujukan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pengembangan siswa sebagai peserta didik. Pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk: 1) memperkuat dasar keimanan dan ketaqwaan, 2) membiasakan untuk berperilaku yang baik, 3) memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar, 4) memelihara kesehatan jasmani dan rohani, 5) memberikan kemampuan untuk belajar dan, 6) membentuk kepribadian yang mantap dan mandiri.

Komite Sekolah SMP sebagai badan pengontrol kegiatan sekolah meliputi pengawasan penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban. Penggunaan dana yang mendapatkan pengawasan akan menyebabkan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kegiatan pengawasan merupakan hal yang esensial dalam bidang manajemen. Pengawasan yang ketat dan terkendali membuat sekolah lebih berhati-hati. Kegiatan sekolah yang selalu mendapatkan pengawasan akan memiliki tingkat kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak pernah mendapatkan pengawasan.

Prinsip pengawasan yang dianut Komite Sekolah bertujuan agar: 1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, 2) memperkokoh tujuan dan meningkatkan kualitas hidup serta, 3) tetap menggairahkan komite untuk menjalin hubungan yang baik dengan sekolah.

Bidang pengawasan yang dikerjakan oleh komite dalam menjalankan perannya meliputi hal yang menyangkut pelaksanaan jadual KBM, bidang anggaran, tenaga kependidikan baik guru maupun non guru. Prestasi sekolah selalu mendapatkan perhatian Komite Sekolah. Komite juga mengadakan pemantauan terhadap hasil ujian, kelulusan maupun kenaikan kelas.

4. Peran Komite Sekolah sebagai Penghubung (Mediator)

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa Komite Sekolah telah menunjukkan perannya sebagai mediator dalam mengakses elemen-elemen masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan sekolah.

Akan tetapi di lain pihak, peran komite belum bisa maksimal jika harus memediasi atau menyampaikan aspirasi sekolah kepada pemerintah. Sekolah merasa komite tidak bisa menembus birokrasi pemerintah yang begitu rumit, sehingga hal – hal yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, contoh; sekolah gratis dan jalur khusus serta BPP, komite kenyataannya hanya bisa menerima kebijakan tersebut. Hal tersebut terjadi karena komite kurang berani di dalam menyampaikan aspirasi sekolah. Kenyataan di lapangan juga menegaskan bahwa ternyata sebagian pengurus komite adalah juga orang pemerintahan. Hal ini jelas membawa dampak yang signifikan terhadap keberanian komite untuk memediasi sekolah dan pemerintah. Adanya perasaan tidak enak, dan sebagainya jika menentang kebijakan pemerintah yang sebetulnya merugikan pihak sekolah.

Pelaksanaan peran mediator tersebut memiliki tujuan antara lain memberikan informasi tentang tujuan-tujuan, program-program serta kebutuhan-kebutuhan sekolah kepada masyarakat. Disamping itu juga memberikan penerangan kepada sekolah tentang kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat yang ditujukan kepada sekolah. Dalam perannya sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat terinci pada program kegiatan Komite Sekolah. Program tersebut antara lain: 1) menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri, 2) membina hubungan yang sinergis antara sekolah dan stakeholders, 3) mengadakan sarasehan pendidikan, 4) menyelenggarakan diskusi pendidikan, 5) menerbitkan media komunikasi dan, 6) pemutahiran data. Program kegiatan yang disusun agar lebih konkrit dan dapat terlaksana, maka harus disertai dengan alokasi dana anggaran.

Komite Sekolah dalam menjalankan perannya sebagai mediator dengan kegiatan antara lain: mengidentifikasi aspirasi masyarakat, menampung usulan kebijakan program yang berasal dari wali murid, masyarakat maupun Komite Sekolah. Komite Sekolah sebagai mediator membuat perumusan kegiatan mediasi antara sekolah dengan pemerintah, elemen masyarakat, wali murid serta dunia industri. Rumusan mediasi tersebut kemudian dibahas bersama sekolah untuk disusun ke dalam suatu proposal. Proposal yang diajukan meliputi: 1) pengajuan kegiatan, 2) permintaan nara sumber kegiatan, 3) pengajuan bantuan sarana prasarana, 4) pengajuan bantuan anggaran untuk pengembangan sekolah.

Pelaksanaan peran Komite Sekolah sebagai penghubung telah membuktikan adanya upaya mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat dan membuka akses hubungan masyarakat. Peran Komite Sekolah sebagai penghubung juga memiliki fungsi dalam mensosialisasikan program sekolah kepada masyarakat. Komite juga berperan memfasilitasi masukan dari masyarakat terhadap kebijakan program pengembangan sekolah. Sebagai penghubung dengan masyarakat, komite juga berperan dalam menampung pengaduan, keluhan dari masyarakat terhadap kinerja sekolah. Masukan yang berasal dari masyarakat kemudian dikomunikasikan kepada sekolah agar memperoleh perhatian yang pada gilirannya menjadi dasar perumusan program kebijakan.

Namun sebagai mediator untuk sekolah dengan pemerintah, atau antara sekolah dengan dunia usaha kurang maksimal. Komite kurang memiliki rasa percaya diri untuk menyuarakan kepentingan pihak sekolah kepada pemerintah kaitannya dengan kebijakan pemerintah tentang sekolah gratis dan penggunaan dana jalur khusus serta sering terlambatnya pencairan dana BOS dan BPP. Juga kurang maksimal dalam melakukan kerjasama dengan dunia usaha / industri. Sehingga banyak DUDI yang berada di lingkungan sekitar sekolah tidak diikutsertakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

G. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disampaikan simpulan sebagai berikut:

Peran komite sekolah SMP di kota Semarang sebagai pemberi pertimbangan terhadap sekolah dalam bidang perencanaan telah dapat mengidentifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat. Pelaksanaan perannya antara lain; membahas dan memberikan masukan untuk RAPBS serta mengesahkannya. Akan tetapi untuk tahun pelajaran 2008/2009 komite dan sekolah belum menyelenggarakan rapat pleno yang membahas RAPBS.

Peran komite sekolah sebagai pemberi dukungan terhadap sekolah adalah ikut membantu melaksanakan pemantauan serta membantu dalam hal pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah. Komite juga sangat berperan dalam mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan sekolah. Peran komite sekolah sebagai pengontrol antara lain dengan mengawasi pengambilan keputusan dan kebijakan serta perencanaan pendidikan di sekolah. Komite juga melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk melaksanakan program sekolah. Komite

sekolah pada kurun waktu tertentu atau pada akhir tahun pelajaran memantau hasil ujian sekolah, siswa yang mengulang serta kondisi prestasi yang diraih oleh siswa.

Peran komite sekolah sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat, sekolah dan pemerintah, Komite belum mampu menyampaikan aspirasi sekolah kaitannya dengan sekolah gratis yang saat ini membingungkan pihak sekolah. Juga tentang pencairan dana yang diperuntukkan sekolah baik itu BOS ataupun BPP yang pencairannya sering terlambat, padahal sekolah butuh dana operasional yang mendesak. Sehingga yang terjadi sekolah dan komite hanya mampu menerima segala kebijakan yang digulirkan pemerintah/pemerintah daerah kepada sekolah.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, dalam penelitian ini dikemukakan saran – saran sebagai berikut:

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan supaya dapat ditingkatkan dengan dukungan pengerjaan administrasi yang tertib, kaitannya dengan RAPBS. Segala bentuk pertimbangan dan analisis serta hasil pembahasan didokumentasikan secara lengkap.

Peran komite sekolah sebagai pemberi dukungan terhadap program sekolah antara lain dengan mengintensifkan pemantauan dalam rangka mengetahui lebih banyak kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah.

Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol dapat dioptimalkan dengan menyusun jadwal kunjungan serta melaksanakannya secara periodik sehingga tanggung jawab yang dibebankan kepada sekolah dapat dipertahankan dengan adanya sistem kontrol yang konsisten.

Peran komite sekolah sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat, dunia industri, pemerintah harus ditingkatkan antara lain dengan menjalin hubungan yang lebih erat baik secara formal kelembagaan maupun informal – personal sehingga mediasi yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Dan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan di antara pengurus dan anggota komite demi kepentingan sekolah kepada pemerintah.

Bagi peneliti berikutnya untuk meneliti dengan kajian yang lebih mendalam sehingga peran komite sekolah dapat terungkap secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 1990, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bappenas, 1999, *MBS di tingkat Pendidikan Dasar*, Naskah Kerjasama Bappenas dan Bank Dunia, Jakarta.
- Bray, Mark, 1996, *Decentralization of Education, Community Financing*, Washington, D.C., The world Bank.
- Buchori, Mochtar, 2001, *Pendidikan Antisipatoris*, Yogyakarta: Kanisius
- Depdikbud, 1996, *Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, Dirjendikdasmen Jakarta.
- Depdiknas, 2001, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 3*, Jakarta.
- _____, 2003, *Pedoman Administrasi Sekolah*, Jakarta.
- _____, 2003, *Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, Jakarta.
- _____, 2003, *Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak Program MBS*, Naskah perjanjian kerjasama Depdiknas dengan UNESCO, Jakarta, Dirjendikdasmen.
- _____, 2004, *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Dewan Pendidikan*, Panduan petunjuk teknis pelaksanaan MBS di Sekolah, Jakarta.
- _____, 2004, *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, Jakarta.
- _____, 2004, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Modul PPPG Tertulis, Bandung.
- Dewan Pendidikan Kota Semarang, 2003, *Panduan Umum Dewan Pendidikan*, PPPG Tertulis, Bandung.
- Faisal, Sana Piah, 1982, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Hermansyah, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: PPPG Tertulis.
- IKIP PGRI. 2003. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Semarang: IKIP Press.
- Koesno, 1994, *Materi Konkerda PGRI XVII, PD I PGRI Jawa Tengah*, Semarang.
- Moeloeng, Lexy, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, 2004, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____, 2004, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S., 1998, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsih.
- Nurkholis, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Republik Indonesia, 2003, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20*, Jakarta: CV. Ekojaya.
- Rohiat, Dr. 2008. *Manajemen Sekolah; teori dasar dan praktek*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sabarguna Boy S., 2005, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Sallis Edward. 2006. *Total Quality Managemnet In Education*. Baturetno: IRCiSoD.
- Sahertian, Piel, 2000, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidik*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Sarkawi, Hr., 2002, *Titik Temu Dalam Dunia Pendidikan*, Jakarta: Nuansa Madani

- Seksi Penelitian dan Pengembangan Dewan Pendidikan Kota Semarang, 2004, *Pelaksanaan Fungsi dan Peran Komite Sekolah se Kota Semarang (Laporan Penelitian)*, Semarang, Dewan Pendidikan Kota Semarang.
- Sidi, Indar Djati, 2003, *Sinergi Pemerintah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Makalah pada Seminar Nasional Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, Semarang.
- Sinungan, M., 1997, *Produktivitas, Apa dan Bagaimana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Slamet PH. 2000, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Makalah dari Internet (<http://pendidikan.net> (12 Agustus 2008)
- Solihudien, Yusep, 2005, *Mengawinkan Komite dan Kepala Sekolah*. Docume 1/XP/Locals-1/Temp/off 26 Pqo.htm (28 Agustus 2008).
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sumaryanto, Totok, 2004, *Paparan Perkuliahan Metodologi Penelitian Kualitatif*, Semarang: UNNES.
- Suparlan, 2005, *Komite Sekolah Sebagai Wahana Integrasi Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, www.Suparlan.com, (28 Agustus 2008).
- Surya Brata, Sumadi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali.
- Suryadi, Ace, 2004, *Optimalisasi Fungsi dan Peran Komite Sekolah*, Depdiknas, 2004.
- Tilaar, H.A.R., *Metode Penelitian Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Umaedi, 2001, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta: Depdiknas, Dirjen Dikdasmen Dikmenum.
- UNNES, 2003, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Tesis, dan Disertasi*, Semarang, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang.
- Wibowo, Mungin Eddy, 2003, *Mengelola Institusi Pendidikan Secara Efektif*. Makalah pada Seminar Nasional Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, 26 Februari 2003 di Semarang.
- Zainuddin, Dr. 2008. *Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan manajemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.